

Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Buru Selatan antara Prioritas Daerah dan Kesiapan Destinasi

Tourism Development Policy in South Buru Regency Linking Regional Priorities and Destination Readiness

Juan A Kapressy*, Wahab Tuanaya, Stanislaus Kostka Ohoiwutun

Magister Administrasi Publik, Universitas Pattimura, Indonesia

* kapresyjuanno@gmail.com (Primary Contact)

ABSTRACT

Keywords

tourism policy; policy implementation; collaborative governance; destination readiness; South Buru

Article History

Received: 2026-09-27
Accepted: 2026-10-13

This study examines how regional tourism policy priorities are translated into destination readiness in South Buru Regency, Indonesia. Using a descriptive qualitative approach, the research draws on semi-structured interviews with 21 coded informants representing government institutions, village authorities, community leaders, tourism businesses, academics, and visitors, complemented by observations and planning-document review. The analysis combines Dunn's policy analysis, Edwards III's policy implementation framework, and Ansell and Gash's collaborative governance perspective. Five findings emerge. First, district-level tourism priorities do not always correspond to the operational needs identified at destination level. Second, irregular program communication hampers coordination between district, subdistrict, and village actors. Third, limited resources and managerial capacity affect facility provision and continuity of support. Fourth, local actors express a demand for greater involvement in planning, while evidence of joint decision-making remains limited. Fifth, the need for reliable visitor information is closely connected to basic facilities and access. The study suggests destination-specific planning that assigns responsibilities, resources, maintenance arrangements, and mechanisms for stakeholder participation. The findings describe reported governance and service conditions; they do not establish causal effects on visitor numbers or local income.

Copyright © 2026, Kapressy et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v5i3.747](https://doi.org/10.56113/takuana.v5i3.747)

1. PENDAHULUAN

Pengembangan pariwisata daerah menuntut kemampuan pemerintah mengubah potensi wilayah menjadi pelayanan yang dapat digunakan wisatawan dan manfaat yang dapat diakses masyarakat. Keindahan alam, daya tarik budaya, dan perhatian pemerintah menyediakan dasar pengembangan, tetapi pelaksanaannya bergantung pada akses menuju destinasi, fasilitas, kapasitas pengelola, serta hubungan kerja lintas organisasi. Persoalan

administrasi publik muncul ketika prioritas yang dinyatakan dalam perencanaan belum diikuti pembagian tanggung jawab dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan destinasi. Hubungan antara arah kebijakan dan kesiapan pelaksanaan menjadi fokus artikel ini.

Kabupaten Buru Selatan memiliki potensi wisata alam, pantai, bahari, dan budaya. Salah satu lokasi yang muncul dalam data penelitian adalah Pantai Wamsoba. Temuan lapangan memperlihatkan persoalan fasilitas dasar, aksesibilitas, promosi, kemampuan pengelola, serta koordinasi antar pelaksana. Pemerintah kabupaten memandang pariwisata sebagai salah satu agenda pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah desa dan masyarakat, sebaliknya, menekankan dukungan yang dapat digunakan untuk menjalankan pelayanan dan pengelolaan destinasi sehari-hari. Perbedaan tersebut memperlihatkan persoalan kebijakan yang perlu dijelaskan: sejauh mana prioritas daerah telah diterjemahkan menjadi kesiapan destinasi untuk melayani pengunjung dan memberi ruang bagi pelaku lokal.

Kajian pariwisata partisipatif memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat dipengaruhi konteks sosial, budaya, dan ekonomi (Timothy, 1999), sementara kerja sama dalam perencanaan destinasi memerlukan pengaturan hubungan antar pemangku kepentingan (Jamal & Getz, 1995). Bramwell dan Sharman (1999) menekankan pentingnya keterwakilan, pembelajaran bersama, dan proses mencapai kesepakatan; Tosun (2000) menguraikan hambatan operasional dan struktural bagi partisipasi di negara berkembang. Literatur tersebut menunjukkan bahwa kehadiran aktor lokal belum cukup untuk membuktikan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Penelitian di Indonesia memperlihatkan bentuk pengaturan yang beragam. Muallim et al. (2024) menelaah kerja sama pemangku kepentingan pariwisata di Sinjai beserta kendala koordinasi dan partisipasinya. Teguh dan Scott (2026) membahas tata kelola destinasi yang dipimpin pemerintah di Labuan Bajo. Literatur internasional juga menunjukkan bahwa jejaring lokal dan kapasitas pemerintah daerah memengaruhi pengorganisasian pembangunan destinasi (Dredge, 2006; Ruhanen, 2013), sedangkan bentuk tata kelola menentukan hubungan antara perumusan dan pelaksanaan kebijakan (Hall, 2011). Temuan tersebut menjadi pembandingan, bukan bukti langsung kondisi Buru Selatan.

Penelitian ini mengkaji hubungan antara prioritas kebijakan pemerintah kabupaten, kebutuhan pemerintah desa, kepentingan pelaku usaha, dan pengalaman wisatawan. Pertanyaan penelitian ialah: bagaimana kebijakan pengembangan pariwisata ditetapkan dan dilaksanakan, kendala apa yang memengaruhi kesiapan destinasi, serta bagaimana aktor lokal dilibatkan dalam prosesnya? Fokus penelitian meliputi perumusan masalah kebijakan, komunikasi dan dukungan pelaksanaan, serta partisipasi dalam perencanaan dan tindak lanjut kegiatan. Penekanan tersebut memungkinkan penilaian yang lebih jelas terhadap jarak antara tujuan pembangunan pariwisata dan kondisi pelayanan pada tingkat destinasi.

Ketiga perspektif teoretis digunakan secara berurutan dan saling melengkapi. Analisis kebijakan Dunn (2018) menguji kesesuaian perumusan masalah dengan pilihan program; kerangka Edwards III (1980) menelusuri apakah pilihan itu didukung komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi; model Ansell dan Gash (2008) menilai apakah aktor yang terdampak memperoleh ruang dialog, membangun komitmen, dan terlibat dalam keputusan bersama. Dengan demikian, kebutuhan yang tidak diterjemahkan menjadi program dibaca melalui Dunn, kendala pelaksanaannya melalui Edwards III, dan keterlibatan aktor dalam penyelesaian kendala tersebut melalui Ansell dan

Gash. Emerson et al. (2012) turut memperlihatkan pentingnya menghubungkan dinamika kolaborasi dengan tindakan bersama; rujukan ini digunakan sebagai pembanding, bukan model keempat. Kesiapan destinasi dalam penelitian ini dipahami sebagai kondisi akses, fasilitas dasar, kemampuan pengelola, ketersediaan informasi pengunjung, serta pengaturan pemeliharaan dan tindak lanjut. Konsep ini dipakai untuk mengorganisasi temuan kualitatif, bukan sebagai indeks numerik. Tujuan penelitian adalah menjelaskan bagaimana perbedaan prioritas dan kebutuhan antar aktor berkaitan dengan implementasi program pariwisata, mengidentifikasi bentuk keterlibatan aktor lokal, dan merumuskan implikasi perbaikan kebijakan yang didukung temuan empiris. Penelitian tidak mengukur dampak ekonomi atau perubahan jumlah kunjungan karena data deret waktu yang dibutuhkan tidak tersedia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Buru Selatan. Unit analisisnya adalah proses penetapan prioritas dan implementasi kebijakan pariwisata daerah serta kaitannya dengan kebutuhan pengelolaan destinasi. Kajian diarahkan pada hubungan pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan dan desa, masyarakat, pelaku usaha, dan pengunjung. Pantai Wamsoba merupakan salah satu destinasi yang tercakup dalam informasi penelitian; hasilnya tidak diperlakukan sebagai gambaran yang otomatis berlaku untuk seluruh objek wisata di kabupaten. Informan penelitian berjumlah 21 yang dipilih secara purposif berdasarkan kewenangan, pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan dalam pengembangan pariwisata. Informan terdiri atas lima kelompok, yaitu Dinas Pariwisata dan Bappeda, dua unsur pemerintah kecamatan, tiga pemerintah desa, dua tokoh adat atau masyarakat, tiga pelaku usaha pariwisata, dua akademisi, dan empat wisatawan. Komposisi ini mencakup perspektif perumus kebijakan, pelaksana, aktor masyarakat dan usaha, serta pengguna layanan wisata. Pemilihan purposif bertujuan memperoleh variasi pengalaman dan bukan menghasilkan sampel yang representatif secara statistik. Rincian informan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi dan kode informan penelitian

Kelompok informan	Jumlah	Kode informan
Dinas Pariwisata dan Bappeda	5	I1-I5
Pemerintah kecamatan	2	I6-I7
Pemerintah desa	3	I8-I10
Tokoh adat atau masyarakat	2	I11-I12
Pelaku usaha pariwisata	3	I13-I15
Akademisi	2	I16-I17
Wisatawan	4	I18-I21
Total	21	

Sumber: Data wawancara penelitian diolah penulis, 2026

Data penelitian terdiri atas hasil wawancara semi-terstruktur, catatan observasi, dan dokumen kebijakan/perencanaan yang berhubungan dengan pariwisata daerah. Wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan tentang penentuan prioritas, komunikasi program, ketersediaan sumber daya, pelibatan masyarakat, dan kebutuhan

layanan wisata. Observasi diarahkan pada kondisi fasilitas dan aktivitas pengelolaan di destinasi yang tercakup dalam pengamatan. Dokumen yang menjadi rujukan kebijakan meliputi RPJMD Kabupaten Buru Selatan 2021–2026 dan Renstra Dinas Pariwisata 2021–2026. Pembacaan dokumen digunakan untuk memahami arah kebijakan, tetapi bahan yang tersedia belum memungkinkan penelusuran rinci setiap kegiatan sampai ke pagu anggaran dan realisasinya.

Analisis data mengikuti tahapan kondensasi, penyajian, dan penarikan serta pemeriksaan kesimpulan (Miles et al., 2014). Pertama, informasi hasil wawancara dan observasi dikelompokkan menurut isu akses, fasilitas, promosi, kapasitas pengelola, koordinasi, serta partisipasi. Kedua, isu dibandingkan berdasarkan posisi aktor dan kode informan untuk mengidentifikasi persamaan maupun perbedaan kebutuhan. Ketiga, temuan diinterpretasikan menggunakan tiga kerangka yang saling melengkapi: Dunn (2018) untuk perumusan masalah dan pemilihan tindakan kebijakan; Edwards III (1980) untuk komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur pelaksanaan; dan Ansell dan Gash (2008) untuk dialog, keterlibatan, serta pengambilan keputusan bersama. Pembahasan membedakan antara keterangan informan, hasil pengamatan, interpretasi peneliti, dan rekomendasi. Tidak digunakan pengukuran statistik atau pengujian sebab-akibat.

Keterpercayaan interpretasi diupayakan melalui pembandingan informasi antar kelompok informan dan pencocokan tema wawancara dengan catatan observasi serta arah dokumen perencanaan yang tersedia. Penyajian hasil menggunakan parafrasa keterangan informan disertai kode, bukan kutipan verbatim yang belum dapat diperiksa terhadap rekaman. Bukti mengenai tanggal kegiatan lapangan, realisasi anggaran, daftar fasilitas setiap lokasi, notula keputusan, dan perubahan jumlah kunjungan belum lengkap. Keterbatasan tersebut diperhitungkan dengan tidak menarik kesimpulan tentang efektivitas terukur, sifat kausal hubungan antar variabel, ataupun pelaksanaan kolaborasi formal yang tidak didukung bukti proses keputusan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Prioritas pariwisata dan perbedaan kebutuhan antar aktor

Hasil penelitian menunjukkan adanya perhatian pemerintah kabupaten terhadap pengembangan pariwisata melalui identifikasi potensi destinasi, sarana, akses, promosi, dan peningkatan kemampuan pengelola. Informan dari pemerintah desa menekankan kebutuhan sarana dasar, informasi program, dan dukungan operasional yang sesuai dengan kondisi setempat. Pelaku usaha memprioritaskan kesinambungan program serta peluang menyediakan layanan lokal, sedangkan wisatawan menempatkan fasilitas dan informasi sebagai kebutuhan langsung. Dengan demikian, para aktor mengakui pentingnya pariwisata, tetapi tidak menempatkan seluruh persoalan pada urutan prioritas yang sama.

Keterangan informan I1–I3 dari unsur pemerintah kabupaten menekankan pemilihan destinasi dan perlunya menggabungkan penyediaan fasilitas dengan penguatan kapasitas pengelola. Sementara itu, informan I8–I10 dari pemerintah desa menonjolkan kebutuhan koordinasi, kepastian informasi program, dan perencanaan bersama. Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa perhatian terhadap potensi wisata sudah dinyatakan pada tingkat kabupaten, tetapi kebutuhan pelaksanaan pada tingkat desa belum seluruhnya memperoleh kejelasan yang sama. Temuan ini menunjukkan tuntutan terhadap komunikasi dan penyesuaian program; tidak berarti seluruh desa tidak pernah dilibatkan.

Perspektif wisatawan memperjelas konsekuensi dari perbedaan prioritas tersebut. Informan I18 dan I20 menghubungkan daya tarik wisata dengan kenyamanan dan kemudahan memperoleh informasi. Kebutuhan yang disebut meliputi akses, kebersihan, toilet, tempat istirahat, dan petunjuk perjalanan. Catatan observasi juga menunjukkan adanya kebutuhan perbaikan fasilitas dasar pada sejumlah lokasi yang diamati. Penelitian tidak menghasilkan inventaris berangka untuk semua destinasi. Karena itu, temuan ini menyatakan jenis persoalan layanan yang teridentifikasi, bukan klaim bahwa sarana tersebut tidak tersedia di seluruh Kabupaten Buru Selatan. Perbedaan perspektif pemerintah kabupaten, desa, pelaku usaha, dan wisatawan merupakan temuan utama pada tahap perumusan dan penjabaran prioritas. Perhatian pemerintah terhadap sektor pariwisata dapat berlangsung bersamaan dengan kebutuhan pengelola lokal yang belum terjawab secara operasional. Kondisi ini mengarahkan analisis pada hubungan antara keputusan program, penanggung jawab, sumber daya, dan tindak lanjut di lokasi wisata. Prioritas daerah menjadi lebih bermakna ketika dapat ditelusuri menjadi layanan yang tersedia dan dikelola secara berkelanjutan.

3.2. Formulasi kebijakan dan kebutuhan pemetaan destinasi

Temuan mengenai formulasi kebijakan mencakup pengenalan masalah destinasi, penentuan prioritas, dan pilihan kegiatan pengembangan. Isu fisik berupa akses dan fasilitas muncul bersama persoalan non-fisik berupa kemampuan pengelola, promosi, serta koordinasi. Keragaman masalah ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata tidak dapat hanya didasarkan pada keberadaan daya tarik alam atau budaya. Setiap lokasi membutuhkan penetapan masalah yang lebih spesifik agar program sesuai dengan hambatan yang dialami pengelola dan pengguna layanan.

Informan I5 dari unsur perencanaan daerah menekankan kebutuhan sinkronisasi program pembangunan pariwisata pada tingkat kabupaten. Dari tingkat desa, I9 menonjolkan pentingnya perencanaan bersama agar kebutuhan lokasi dapat masuk dalam pelaksanaan program. Kedua temuan memperlihatkan dua tuntutan berbeda yang saling terkait, yaitu keselarasan antar perangkat daerah dan penyesuaian program terhadap kondisi destinasi. Data penelitian belum memuat riwayat setiap usulan desa hingga keputusan anggaran, sehingga perbedaan kebutuhan tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai bukti penolakan sistematis terhadap aspirasi desa. Dalam perspektif Dunn (2018), persoalan kebijakan perlu dirumuskan dengan membedakan kondisi yang dihadapi, kebutuhan perbaikan, dan dugaan penyebab. Sebagai contoh, pengunjung yang kekurangan informasi lokasi membutuhkan respons berbeda dari fasilitas yang rusak atau jalur menuju destinasi yang sulit dilalui. Pilihan program juga ditentukan oleh aktor yang berwenang menyiapkan dan menjalankan tindakan (Hall, 2011). Kerangka ini menjelaskan mengapa masalah akses, fasilitas, promosi, dan kemampuan pengelola perlu ditetapkan menurut kondisi destinasi, bukan digabungkan sebagai satu kategori masalah yang seragam.

Alternatif kebijakan yang teridentifikasi melalui keterangan informan meliputi penyediaan sarana dasar, perbaikan akses, pelatihan, promosi, penguatan pengelola, dan kemitraan lokal. Alternatif tersebut saling berhubungan: penyediaan fasilitas memerlukan pemeliharaan; promosi memerlukan informasi yang sesuai dengan kondisi lokasi; dan pelatihan membutuhkan kesempatan menerapkan keterampilan. Analisis menunjukkan perlunya penentuan urutan tindakan berdasarkan kebutuhan nyata tiap destinasi.

Penelitian tidak menyediakan data biaya, manfaat, dan realisasi anggaran untuk membandingkan efisiensi investasi antar alternatif.

3.3. Komunikasi, sumber daya, dan kesinambungan pelaksanaan

Dari aspek komunikasi kebijakan, informan I6 (kecamatan) dan I10 (desa) menjelaskan perlunya informasi program yang lebih teratur dan jelas. Koordinasi antara kabupaten, kecamatan, dan desa telah dikenal dalam pelaksanaan kebijakan, tetapi kebutuhan informasi mengenai jadwal, lokasi, penugasan, dan tindak lanjut belum sepenuhnya terjawab. Persoalan yang teridentifikasi bukan semata keberadaan komunikasi, melainkan konsistensi dan kegunaan informasi yang diterima pelaksana di tingkat lokal. Penelitian tidak menghitung frekuensi rapat atau pemberitahuan, sehingga kesimpulan dibatasi pada pengalaman koordinasi yang disampaikan informan.

Ketersediaan sumber daya merupakan persoalan berikutnya. Informan I1 menekankan penetapan prioritas kegiatan sesuai kemampuan anggaran, sedangkan I3 menyoroti kemampuan pengelola setelah sarana dibangun. Catatan observasi mengidentifikasi kebutuhan toilet, tempat sampah, tempat parkir, tempat istirahat, serta papan informasi di sejumlah tempat pengamatan. Kegiatan kebersihan, pelayanan wisatawan, dan pembaruan informasi juga membutuhkan tenaga dan kemampuan pengelola. Bukti ini menunjukkan jenis kebutuhan sumber daya, tetapi tidak memungkinkan penentuan jumlah kekurangan dana, pegawai, atau fasilitas untuk masing-masing destinasi. Pada aspek disposisi pelaksana, informasi penelitian menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pengembangan pariwisata. Akan tetapi, informan I14 dari pelaku usaha menekankan kebutuhan dukungan yang berlangsung secara konsisten, bukan hanya kegiatan sesaat. Perbedaan pandangan tersebut lebih tepat dibaca sebagai persoalan kesinambungan pelaksanaan daripada sebagai bukti langsung tidak adanya komitmen pemerintah. Dari aspek struktur birokrasi, informan I5 menerangkan bahwa akses, fasilitas, pengelolaan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan lebih dari satu perangkat daerah. Temuan tersebut mengindikasikan pentingnya pembagian tugas, sementara dokumen rinci kewenangan operasional dan hasil penugasan belum tersedia untuk dinilai lebih lanjut.

Keempat komponen implementasi Edwards III (1980) membantu menjelaskan keterkaitan masalah lapangan. Kebutuhan keteraturan informasi (I6 dan I10) berhubungan dengan persiapan kegiatan pada tingkat desa; keterbatasan anggaran dan kapasitas pengelola (I1 dan I3) memengaruhi pilihan tindakan; permintaan dukungan berkelanjutan (I14) menunjukkan perlunya perhatian terhadap tindak lanjut; dan sinkronisasi lintas perangkat daerah (I5) terkait pembagian tanggung jawab. Keterkaitan ini merupakan interpretasi atas pola informasi antar aktor, bukan pembuktian sebab-akibat atau penerangan unsur implementasi yang paling dominan. Implikasi kebijakannya ialah kebutuhan mencatat kegiatan per destinasi secara operasional: masalah yang akan ditangani, perangkat daerah pelaksana, sumber daya, jadwal, penanggung jawab pemeliharaan, dan bentuk pelaporan kepada desa serta pengelola. Usulan ini diturunkan dari kebutuhan koordinasi yang ditemukan dalam penelitian dan belum dinyatakan sebagai mekanisme yang sudah dilaksanakan pemerintah daerah.

3.4. Keterlibatan masyarakat dan batas koordinasi administratif

Hasil penelitian memperlihatkan peran masyarakat sebagai pelaku potensial dalam kebersihan destinasi, pengelolaan, penyediaan produk lokal, serta pelestarian budaya. Akan tetapi, informan I11–I12 menekankan keinginan untuk terlibat sejak tahap perencanaan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keikutsertaan dalam kegiatan ekonomi dan pemeliharaan tidak identik dengan pengaruh terhadap keputusan program. Literatur Tosun (2000) menjelaskan kemungkinan hambatan kelembagaan dan operasional dalam partisipasi, sedangkan penelitian ini menunjukkan adanya kebutuhan memperjelas mekanisme pelibatan, tanpa menetapkan secara pasti bentuk hambatan kekuasaan pada semua destinasi.

Kelompok pelaku usaha (I13–I15) menyoroti kesempatan mengembangkan usaha lokal, tersedianya fasilitas dan promosi, serta keberlanjutan dukungan pemerintah. Temuan tersebut memperlihatkan hubungan antara pengelolaan destinasi dan peluang ekonomi masyarakat. Namun, penelitian tidak mengukur perubahan omzet, penyerapan tenaga kerja, atau distribusi manfaat antar kelompok usaha. Dengan demikian, hasil yang dapat dinyatakan ialah adanya kebutuhan menghubungkan keputusan pengembangan destinasi dengan aktivitas usaha lokal, bukan telah terjadinya peningkatan pendapatan. Untuk menilai kolaborasi, Ansell dan Gash (2008) membedakan pertemuan administratif dari proses dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama. Informan I6 dan I10 menunjukkan adanya hubungan koordinasi pemerintahan, sedangkan I9 serta I11–I12 menekankan kebutuhan perencanaan bersama. Bukti penelitian belum memperlihatkan secara rinci forum multipihak, mekanisme perundingan usulan, pembagian tanggung jawab yang disepakati, atau tindak lanjut keputusan bersama. Oleh sebab itu, hasil penelitian lebih kuat menunjukkan kebutuhan memperluas partisipasi dalam perencanaan dan pemantauan daripada menyatakan tata kelola kolaboratif sudah terlembaga.

Temuan mengenai pelibatan masyarakat sejalan dengan kajian Muallim et al. (2024) yang memperlihatkan bahwa kerja sama pariwisata dapat menghadapi hambatan koordinasi. Bramwell dan Sharman (1999) menekankan persoalan keterwakilan dan proses mencapai kesepakatan, sementara Saito dan Ruhanen (2017) mengingatkan bahwa pengaruh para pemangku kepentingan dapat berbeda. Nunkoo (2015) menunjukkan keterkaitan pengetahuan dan peran warga dengan kepercayaan terhadap pemerintah. Pada kasus Buru Selatan, temuan yang secara langsung didukung data adalah tuntutan terhadap akses perencanaan dan kejelasan tindak lanjut; kualitas kepercayaan atau ketimpangan kekuasaan belum diukur secara khusus. Pembandingan dengan studi Teguh dan Scott (2026) serta Aas et al. (2005) menempatkan komunikasi dan keterlibatan masyarakat sebagai aspek penting pengelolaan destinasi. Emerson et al. (2012) menambahkan bahwa proses kolaborasi perlu menghasilkan kemampuan bertindak bersama. Konteks Buru Selatan mengisyaratkan pentingnya forum pembahasan yang memiliki mandat, informasi program, dan mekanisme memantau keputusan. Bentuk organisasi atau forum yang paling tepat belum dapat ditentukan hanya dari data penelitian ini dan perlu disesuaikan dengan kewenangan serta kondisi setiap destinasi.

3.5. Promosi dan fasilitas dalam pengalaman wisatawan

Promosi pariwisata muncul dalam informasi penelitian melalui penggunaan media sosial, kegiatan budaya, serta kemungkinan kerja sama dengan pelaku usaha. Informan I4 menekankan pentingnya komunikasi promosi yang konsisten, sedangkan I20 dari kelompok wisatawan membutuhkan informasi praktis mengenai lokasi, akses, fasilitas, dan kegiatan wisata. Perbandingan ini menunjukkan bahwa promosi tidak hanya berkaitan dengan pengenalan daya tarik, tetapi juga dengan ketepatan informasi layanan yang dapat digunakan pengunjung. Wang dan Fesenmaier (2007) menggarisbawahi koordinasi antar pelaku pemasaran destinasi; efektivitas promosi di Buru Selatan sendiri belum diukur melalui data jangkauan atau perubahan perilaku kunjungan. Informan I18 menempatkan fasilitas pendukung sebagai bagian dari pengalaman mengunjungi destinasi. Kebutuhan tersebut memperkuat temuan bahwa promosi dan kesiapan fasilitas perlu direncanakan secara terpadu. Informasi publik tentang suatu lokasi seyogianya mencerminkan kondisi sarana, akses, kebersihan, dan layanan aktual. Hubungan yang ditemukan adalah kesesuaian kebutuhan antara penyampaian informasi dan kondisi layanan, bukan bukti bahwa kampanye promosi tertentu telah menyebabkan keluhan atau penurunan kepuasan wisatawan.

Potensi pengembangan wisata budaya yang teridentifikasi meliputi tradisi, kesenian, kuliner, dan kerajinan lokal. Pelibatan masyarakat pemilik dan pengelola praktik budaya menjadi relevan agar pemanfaatannya selaras dengan kepentingan setempat. Bramwell (2011) dan Bramwell dan Lane (2011) menekankan keterkaitan tata kelola dengan kepentingan, pengambilan keputusan, dan keberlanjutan. Karena data penelitian belum memuat indikator kondisi lingkungan maupun pembagian manfaat, kehadiran unsur budaya dan produk lokal belum dapat digunakan untuk menyimpulkan tercapainya pariwisata berkelanjutan. Akses geografis juga muncul sebagai hambatan dalam pengembangan destinasi. Informasi yang tersedia menunjukkan perlunya memperbaiki keterhubungan lokasi wisata dengan layanan pengunjung, tetapi belum merinci jarak, biaya perjalanan, waktu tempuh, atau kondisi ruas jalan untuk setiap tempat. Sebagaimana dibahas Ruhanen (2013), peran pemerintah lokal penting dalam memfasilitasi pengembangan destinasi. Hasil penelitian ini mengarah pada kebutuhan membedakan masalah konektivitas, fasilitas di lokasi, dan informasi perjalanan sebelum menentukan kegiatan perbaikan.

3.6. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi destinasi

Pembacaan terpadu terhadap hasil penelitian menghasilkan tiga penjelasan. Pertama, perbedaan prioritas kabupaten dan kebutuhan desa berkaitan dengan ketepatan penetapan masalah serta pemilihan program (Dunn, 2018). Kedua, kebutuhan komunikasi teratur, sumber daya, kemampuan pengelola, dan pembagian tugas menunjukkan persoalan implementasi (Edwards III, 1980). Ketiga, permintaan pelibatan dalam perencanaan memperlihatkan perlunya proses keputusan bersama yang dapat ditelusuri, meskipun bukti pelembagaan kolaborasinya belum cukup (Ansell & Gash, 2008). Tabel 2 merangkum temuan empiris yang mendasari interpretasi tersebut dan implikasi perbaikannya.

Rencana pengembangan berbasis destinasi yang diusulkan perlu dimulai dari penetapan masalah dan pemetaan sarana, akses, pengelola, layanan, serta kebutuhan usaha setempat. Setiap tindakan selanjutnya harus dihubungkan dengan kewenangan dan

kelayakan sumber daya, sementara pemerintah desa, pengelola, dan masyarakat memperoleh kejelasan mengenai cara menyampaikan usulan serta memantau hasil keputusan. Rumusan ini merupakan implikasi penerapan Dunn, Edwards III, serta Ansell dan Gash terhadap pola masalah empiris, bukan deskripsi bahwa seluruh mekanisme tersebut telah diterapkan di Buru Selatan.

Tabel 2. Matriks temuan empiris dan implikasi kebijakan pengembangan pariwisata

Aspek	Temuan empiris	Implikasi kebijakan
Formulasi	I5 menekankan sinkronisasi program; I9 menekankan perencanaan desa sesuai kebutuhan destinasi.	Identifikasi masalah dan pilih program berdasarkan kondisi tiap destinasi.
Implementasi	I6 dan I10 memerlukan informasi yang lebih teratur; I1 dan I3 menyoroti anggaran serta kemampuan pengelola; I14 menuntut kesinambungan.	Tetapkan jadwal, peran pelaksana, sumber daya, dan rencana pemeliharaan.
Partisipasi	I9 serta I11–I12 menghendaki pelibatan sejak perencanaan; bukti proses keputusan bersama masih terbatas.	Perjelas mekanisme penyampaian usulan, pembahasan, dan pelaporan tindak lanjut.
Pelayanan destinasi	I18 menyoroti fasilitas; I20 menekankan informasi praktis bagi wisatawan; observasi menunjukkan kebutuhan sarana dasar.	Selaraskan promosi dengan kondisi akses, fasilitas, kebersihan, dan informasi aktual.
Evaluasi	Catatan terperinci mengenai hasil program, kondisi sarana per lokasi, dan manfaat ekonomi belum tersedia.	Bangun pencatatan keluaran, fungsi fasilitas, keterlibatan aktor, dan pengalaman pengguna.

Sumber: Hasil analisis wawancara informan

Evaluasi pelaksanaan kebijakan sebaiknya memisahkan keluaran kegiatan dari kondisi layanan. Pembangunan fasilitas merupakan keluaran, sedangkan keberfungsian dan pemeliharaan merupakan aspek pelayanan. Pelatihan dapat dicatat melalui peserta dan tindak lanjut penggunaan keterampilan; promosi dapat dinilai dari ketepatan serta pembaruan informasi; dan partisipasi dapat dinilai melalui proses usulan, keputusan, serta pelaporan kembali. Indikator tersebut merupakan usulan operasional dari hasil penelitian. Tanpa data dasar per lokasi atau waktu, belum mungkin menetapkan capaian angka maupun membandingkan efektivitas antar periode. Perbedaan kebutuhan antar kelompok informan menunjukkan bahwa prioritas pariwisata daerah perlu diterjemahkan menjadi tindakan dan layanan yang dapat diamati di lokasi wisata. Hasil ini bersifat kontekstual dan interpretatif. Keterbatasan dokumentasi mengenai keputusan, anggaran, inventaris fasilitas, dan indikator ekonomi membatasi kemampuan penelitian untuk menilai efektivitas program secara terukur.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pengembangan pariwisata telah memperoleh perhatian dalam kebijakan daerah Kabupaten Buru Selatan, tetapi kebutuhan operasional di tingkat destinasi belum selalu sejalan dengan penekanan prioritas pada tingkat kabupaten. Pemerintah desa menekankan kepastian informasi dan perencanaan bersama; pelaku usaha membutuhkan dukungan yang berkelanjutan; masyarakat ingin terlibat dalam perumusan kegiatan; dan wisatawan membutuhkan fasilitas serta informasi yang dapat

diandalkan. Temuan tersebut memperlihatkan kesenjangan terutama pada penjabaran prioritas menjadi tugas, dukungan sumber daya, dan layanan destinasi. Penjelasan terhadap kondisi tersebut memadukan tiga perspektif. Dunn (2018) membantu memahami perlunya perumusan masalah yang sesuai kebutuhan setiap lokasi; Edwards III (1980) memperlihatkan arti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur pelaksana; sedangkan Ansell dan Gash (2008) mengarahkan perhatian pada kualitas keterlibatan serta keputusan bersama. Berdasarkan temuan itu, pemerintah daerah perlu memprioritaskan pemetaan masalah per destinasi, pembagian tanggung jawab lintas instansi, pemeliharaan sarana, peningkatan kemampuan pengelola, dan mekanisme konsultasi serta tindak lanjut yang dapat dipantau oleh aktor lokal.

Hasil penelitian ini tidak membuktikan bahwa keputusan kolaboratif telah berjalan secara penuh dan tidak menyediakan dasar untuk menyatakan dampak kausal kebijakan terhadap kunjungan wisata atau pendapatan masyarakat. Penguatan penelitian berikutnya memerlukan rekam keputusan program, data anggaran dan realisasi, catatan kondisi fasilitas, dan indikator pengalaman pengunjung dari waktu ke waktu. Pembatasan tersebut tidak mengurangi temuan utama mengenai kebutuhan menyelaraskan prioritas pembangunan pariwisata dengan kesiapan pelayanan pada tingkat destinasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aas, C., Ladkin, A., & Fletcher, J. (2005). Stakeholder collaboration and heritage management. *Annals of Tourism Research*, 32(1), 28–48. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2004.04.005>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bramwell, B. (2011). Governance, the state and sustainable tourism: A political economy approach. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4–5), 459–477. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.576765>
- Bramwell, B., & Lane, B. (2011). Critical research on the governance of tourism and sustainability. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4–5), 411–421. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.580586>
- Bramwell, B., & Sharman, A. (1999). Collaboration in local tourism policymaking. *Annals of Tourism Research*, 26(2), 392–415. [https://doi.org/10.1016/S0160-7383\(98\)00105-4](https://doi.org/10.1016/S0160-7383(98)00105-4)
- Dredge, D. (2006). Policy networks and the local organisation of tourism. *Tourism Management*, 27(2), 269–280. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2004.10.003>
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Edwards, G. C., III. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>

- Hall, C. M. (2011). A typology of governance and its implications for tourism policy analysis. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4-5), 437-457. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.570346>
- Jamal, T. B., & Getz, D. (1995). Collaboration theory and community tourism planning. *Annals of Tourism Research*, 22(1), 186-204. [https://doi.org/10.1016/0160-7383\(94\)00067-3](https://doi.org/10.1016/0160-7383(94)00067-3)
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Muallim, A. H., Juharni, & Suaib, M. R. (2024). Colaborative governance pengembangan pariwisata dalam peningkatan pendapatan asli daerah: Studi kasus Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang pengembangan pariwisata Kabupaten Sinjai. *Paradigma Journal of Administration*, 2(2), 83-88. <https://doi.org/10.35965/pja.v2i2.5159>
- Nunkoo, R. (2015). Tourism development and trust in local government. *Tourism Management*, 46, 623-634. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.08.016>
- Ruhanen, L. (2013). Local government: Facilitator or inhibitor of sustainable tourism development? *Journal of Sustainable Tourism*, 21(1), 80-98. <https://doi.org/10.1080/09669582.2012.680463>
- Saito, H., & Ruhanen, L. (2017). Power in tourism stakeholder collaborations: Power types and power holders. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 31, 189-196. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2017.01.001>
- Teguh, F. X., & Scott, N. (2026). Government-led DMO and collaborative governance practices: Case study in Labuan Bajo, Flores, Indonesia. *Jurnal Kepariwisataaan Indonesia*, 20(1), 41-74. <https://doi.org/10.47608/jki.v20i12026.41-74>
- Timothy, D. J. (1999). Participatory planning: A view of tourism in Indonesia. *Annals of Tourism Research*, 26(2), 371-391. [https://doi.org/10.1016/S0160-7383\(98\)00104-2](https://doi.org/10.1016/S0160-7383(98)00104-2)
- Tosun, C. (2000). Limits to community participation in the tourism development process in developing countries. *Tourism Management*, 21(6), 613-633. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(00\)00009-1](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(00)00009-1)
- Wang, Y., & Fesenmaier, D. R. (2007). Collaborative destination marketing: A case study of Elkhart County, Indiana. *Tourism Management*, 28(3), 863-875. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2006.02.007>